



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 28 Mei 2020

Halaman: 1

Tahun Ini Tak Dapat THR, Non-ASN Mengadu

JOGJA, Radar Jogja – Mengawasi dan menerima aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR), pemerintah daerah (Pemda) di DIY justru tak melaksanakannya. Para pekerja non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemda tahun ini tak mendapat THR. Salah seorang pekerja dengan status tenaga bantu (Naban) di

Pemkot Jogja, yang meminta nadanya tidak dikorbankan, mengaku baru tahun ini tidak memperoleh THR. Meski sudah belasan tahun bekerja di lingkungan Pemkot Jogja. "Ya baru tahun ini tidak dapat THR, tahun-tahun sebelumnya pasti dapat," katanya kepada Radar Jogja, kemarin (27/5).

► Baca Tahun... Hal 3

Sambungan dari hal 1

Dia tidak tahu alasannya. Termasuk apakah terkait penyesuaian anggaran terkait korona. Dengan pimpinannya di organisasi perangkat daerah (OPD) pun tidak diberitahu. "Yo iki, wong liyo kon bayar THR, pegawaine dewe ra dibayar," sindirnya.

Posko pemantauan THR yang dibuka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Nakertrans) Kota Jogja Riyanto mengatakan pengaduan salah satunya dari sesama instansi. Pemerintah kota telah memperkerjakan tenaga teknis lewat jasa orang perorangan. "Iya ada non-ASN mengadu ke kita," katanya ditemui di ruangnya kemarin (27/5).

Menurut dia, dalam ketenagakerjaan orang yang diperkerjakan dari pihak yang memperkerjakan seseorang atau dari pihak ketiga

untuk kepentingan mereka wajib hukumnya memberikan THR kepada yang bersangkutan. "Pihak ketiga harus berhak membayarkan (THR)," ujarnya.

Meski baru satu orang non-ASN yang mengadu. Namun hampir semua tenaga teknis setiap dinas di lingkungan pemkot dalam hal tersebut bisa memahami. Tenaga teknis direkrut untuk membantu menyelesaikan sebuah kegiatan agar tercapai sesuai rencana. "Dua kali kontrak tidak berbunyi ada pemberian (THR) tapi dalam kontrak setahun dengan sebulannya sekian tanpa ada hal-hal yang lain untuk memberikan sesuatu kepada mereka," jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Wasesa juga menyebut hanya menganggarkan THR untuk aparatur sipil negara (ASN) kecuali eselon II. Tahun ini sebesar Rp 23 miliar THR yang sudah diberikan kepada ASN. ASN yang mendapatkan THR yakni eselon III ke bawah yaitu

eselon IV dan staf.

Sedang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung menyebut, di Bantul non-ASN yang memperoleh THR hanya yang masuk dalam Badan Layanan Umum (BLU). BLU di Bantul adalah RSUD Panembahan Senopati dan puskesmas-puskesmas di Bantul. Menurut PP 24/2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya 2020, BLU dapat menerima THR. RSUD Panembahan Senopati disebut telah memiliki regulasi pemberian THR kepada BLU yang dipekerjakan. "Dinkes (Dinas Kesehatan) Bantul belum mengatur BLU yang bekerja di puskesmas," jelasnya.

Menurut dia, tahun ini total THR yang dicairkan BKAD Bantul sejumlah Rp 35 miliar. Namun, Trisna tidak menyebut rincian THR yang disalurkan pada BLU. "Saya lupa, karena anggaran di masing-masing OPD, meskipun kami yang mengatur," ungkapnya. (cr2/wia/pr/fj)

☐ Positif

☐ Segera

☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005